

Hambatan dan Pendukung Ekonomi Politik dalam Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis

Thomy Wahyudi Ade Putra

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
thomywahyudi@student.uns.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi sering diposisikan sebagai prasyarat utama pengurangan kemiskinan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak berlangsung secara otomatis, linier, atau merata. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi politik berperan sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Data diperoleh dari basis data Scopus untuk periode 2021–2026, dan melalui proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, serta inklusi diperoleh 19 artikel yang relevan. Analisis dilakukan melalui thematic synthesis dengan tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi penting, tetapi tidak cukup, untuk menurunkan kemiskinan. Efektivitas hubungan pertumbuhan–kemiskinan sangat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi politik yang memediasi distribusi manfaat pertumbuhan. Hambatan utama mencakup lemahnya tata kelola, institusi yang eksklusif, distorsi distribusi, kapasitas implementasi yang rendah, serta relasi kekuasaan yang mendorong konsentrasi manfaat pada kelompok dominan. Sebaliknya, kualitas institusi, kapasitas negara, mekanisme redistribusi sosial dan fiskal, tata kelola yang akuntabel, serta keterlibatan aktor non-negara berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan. Studi ini menegaskan bahwa faktor ekonomi politik bukan sekadar konteks eksternal, melainkan mekanisme kausal yang menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan yang inklusif.

Kata Kunci: Ekonomi Politik; Pertumbuhan Ekonomi; Pengurangan Kemiskinan; Tata Kelola; Redistribusi; Hubungan Pertumbuhan–Kemiskinan

Abstract

Economic growth has long been regarded as a key prerequisite for poverty reduction. However, growing evidence suggests that the relationship between economic growth and poverty reduction is neither automatic, linear, nor uniformly distributed. This study aims to examine how political economy factors function as barriers and enablers in linking economic growth to poverty reduction in Indonesia. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach following the PRISMA guidelines. Data were collected from the Scopus database for the period 2021–2026, resulting in 19 articles selected through identification, screening, eligibility, and inclusion processes. Data were analyzed using thematic synthesis through open coding, axial coding, and selective coding. The findings show that economic growth is a necessary but insufficient condition for poverty reduction. The effectiveness of the growth–poverty relationship is shaped by political economy factors that mediate the distribution of growth benefits. Key barriers include weak governance, exclusive institutions, distributional distortions, low implementation capacity, and power relations that concentrate benefits among dominant groups. In contrast, institutional quality, state capacity, social and fiscal redistribution, accountable governance, and the involvement of non-state actors function as enabling factors that strengthen the poverty-reducing effects of growth. This study argues that political economy factors

should be understood not merely as contextual conditions, but as causal mechanisms that determine whether economic growth can be translated into inclusive poverty reduction. The study contributes to the literature by developing a conceptual understanding of the growth–poverty linkage as a politically mediated process.

Keywords: *Political Economy; Economic Growth; Poverty Reduction; Growth–Poverty Linkage; Governance; Redistribution*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade dipandang sebagai prasyarat utama pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan konvensional, peningkatan output diasumsikan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Namun, literatur menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak bersifat otomatis, linier, atau seragam antarnegara maupun antarwilayah. Dalam banyak konteks, pertumbuhan berlangsung tanpa penurunan kemiskinan yang sebanding, bahkan dalam beberapa kasus disertai meningkatnya ketimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memediasi bagaimana hasil pertumbuhan didistribusikan, siapa yang memperoleh manfaat, dan melalui mekanisme kelembagaan apa manfaat tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan (Asadullah et al., 2023; Agnolin et al., 2024; Nugroho et al., 2021; Ayoo, 2022).

Literatur kontemporer menegaskan bahwa relasi pertumbuhan–kemiskinan tidak cukup dijelaskan melalui variabel ekonomi semata, tetapi perlu dipahami melalui perspektif ekonomi politik. Perspektif ini melihat pertumbuhan bukan hanya sebagai proses peningkatan output, tetapi sebagai hasil interaksi antara institusi, distribusi kekuasaan, desain kebijakan, dan struktur insentif yang membentuk alokasi sumber daya (Stockhammer, 2022; Clift, 2021). Dalam kerangka ini, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi apakah konfigurasi politik dan kelembagaan memungkinkan hasil pertumbuhan menjadi inklusif dan berdampak pada kelompok miskin.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi politik dapat berfungsi sebagai hambatan dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Kelemahan tata kelola, korupsi, kebijakan yang bias elite, institusi yang eksklusif, serta lemahnya kapasitas negara sering menghambat distribusi manfaat pertumbuhan kepada kelompok miskin (Curtis, 2021; Coccia, 2021; Abeyagoonasekera, 2023). Dalam kondisi demikian, pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, sementara kelompok miskin tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Literatur juga menunjukkan bahwa hambatan tersebut diperkuat oleh salah sasaran program, lemahnya koordinasi kebijakan, policy drift, serta persistensi poverty trap yang mereproduksi kemiskinan secara struktural (Nugroho et al., 2021; Ayoo, 2022; Malevolti, 2023).

Selain itu, berbagai studi menegaskan bahwa ketimpangan distribusi, relasi patronase, dan rent-seeking dapat melemahkan kemampuan pertumbuhan untuk menghasilkan dampak pengurangan kemiskinan. Dukungan negara terhadap sektor tertentu, jika dibentuk oleh distorsi

politik atau dominasi elite, dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif dan memperdalam eksklusi sosial (Espinosa et al., 2021; Szanyi, 2022). Perspektif ini menunjukkan bahwa hambatan pengurangan kemiskinan tidak hanya bersumber dari kekurangan sumber daya, tetapi juga dari struktur kekuasaan dan desain kelembagaan yang menghambat redistribusi hasil pertumbuhan.

Di sisi lain, literatur juga mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi politik yang berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kualitas institusi, kapasitas negara, kebijakan fiskal redistributif, perlindungan sosial, dan tata kelola yang akuntabel secara konsisten ditemukan memperbesar kemungkinan agar manfaat pertumbuhan menjangkau kelompok miskin (Lustig, 2023; Pouw & Bender, 2022). Dalam konteks ini, pertumbuhan menjadi lebih inklusif ketika negara mampu mengelola redistribusi, memperluas investasi sosial, dan memastikan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar serta peluang ekonomi.

Peran aktor non-negara juga muncul sebagai faktor pendukung penting. NGO, organisasi masyarakat sipil, inovasi sosial, dan pembiayaan inklusif seperti mikrofinans sering diidentifikasi berkontribusi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, memperluas akses sumber daya, dan meningkatkan efektivitas kebijakan anti-kemiskinan (Fuseini et al., 2022; Ipinaiye & Olaniyan, 2023; Hammond et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi juga pada ekosistem tata kelola yang melibatkan interaksi negara, pasar, dan aktor sosial.

Literatur juga menunjukkan bahwa hambatan dan pendukung tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi melalui mekanisme yang kompleks dan saling berinteraksi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dapat lebih efektif menurunkan kemiskinan ketika didukung institusi inklusif dan kebijakan redistributif, tetapi dampaknya dapat melemah ketika berhadapan dengan korupsi, kapasitas implementasi yang rendah, atau konflik distribusi. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai *growth-poverty linkage* yang dimediasi oleh faktor-faktor ekonomi politik, bukan sebagai hubungan langsung yang bersifat otomatis.

Meskipun demikian, literatur yang ada kurang menguraikan mekanisme interaksi di mana faktor-faktor ekonomi politik secara bersama-sama memediasi hasil pertumbuhankemiskinan. Sebagian besar studi cenderung menganalisis pertumbuhan, kemiskinan, institusi, atau tata kelola secara parsial, sementara kajian yang secara sistematis mensintesis bagaimana faktor-faktor ekonomi politik berfungsi sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimana literatur menjelaskan peran faktor-faktor ekonomi politik sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan? Studi ini bertujuan mensintesis hambatan, pendukung, serta mekanisme interaksi antar faktor tersebut, sekaligus mengembangkan kerangka konseptual mengenai *growth-poverty linkage* sebagai proses yang dimediasi faktor ekonomi politik.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) untuk secara kritis menilai dan mensintesis literatur tentang Hambatan dan Pendukung Ekonomi Politik Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. SLR dipilih karena menyajikan sintesis bukti ilmiah yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga mengurangi bias subjektif dalam proses pengumpulan dan analisis literatur (Snyder, 2019). Melalui metode ini, studi ini berupaya mengintegrasikan berbagai temuan yang sebelumnya terfragmentasi dalam studi terpisah, sehingga membangun kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan.

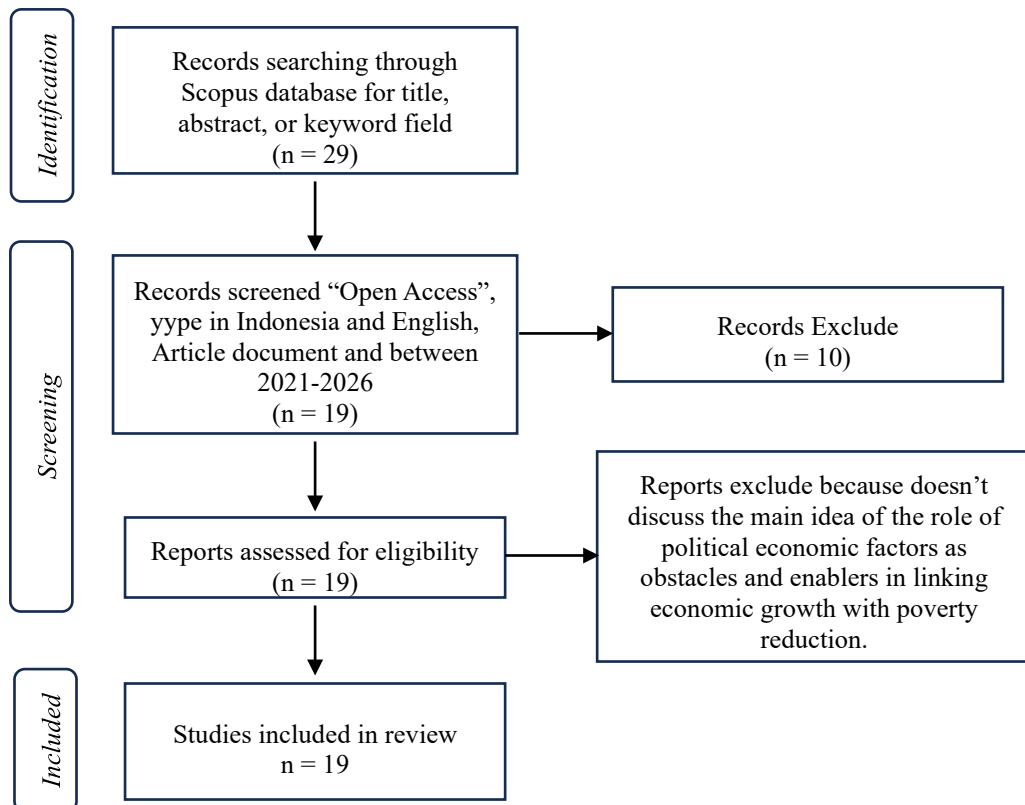
Perencanaan dan desain studi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal penelitian berfokus pada pengembangan protokol penelitian. Protokol ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan seluruh proses konsisten dan transparan. Pertanyaan penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi Bagaimana peran faktor-faktor ekonomi politik sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Cakupan penelitian dibatasi pada periode 2021–2026 untuk menangkap perkembangan dalam literatur selama lima tahun terakhir. Berdasarkan proses identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion, diperoleh 19 artikel yang memenuhi kriteria inklusi.

Materi yang digunakan diperoleh melalui basis data Scopus. Pencarian dilakukan menggunakan string pencarian dengan kombinasi kata kunci dan operator Boolean yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu: *"political economy" OR "economic politics" OR "political determinants" OR "institutional factors" OR governance OR institutions OR power OR "state capacity" OR elites OR "policy regime" AND "economic growth" OR growth OR development AND "poverty reduction" OR "poverty alleviation" OR "poverty decline" OR "poverty eradication" OR "reducing poverty" AND "barrier" OR "constraint" OR "obstacle" OR "challenge" OR "support" OR "driver" OR "enabler" OR "facilitator" OR "determinant" AND "Indonesia" OR "Indonesian"*. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang (i) diterbitkan dalam jurnal peer-review antara tahun 2021 dan 2026, (ii) menyoroti faktor-faktor ekonomi politik sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan, dan (iii) tersedia dalam teks lengkap. Sementara itu, artikel non-ilmiah, laporan kebijakan, opini, dan publikasi populer dikecualikan dari analisis.

Artikel yang lolos proses seleksi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten. Informasi yang diekstrak meliputi identitas publikasi (tahun, jurnal, negara asal), kerangka teoritis yang digunakan, fokus isu atau tingkat pemerintahan yang diteliti, pendekatan metodologis, dan temuan utama yang berkaitan dengan peran faktor-faktor ekonomi politik sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Data yang dikumpulkan dipetakan dalam tabel matriks untuk memfasilitasi identifikasi pola, tren tematik, dan kesenjangan literatur.

Untuk memastikan keakuratan, proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahap: tahap pertama didasarkan pada judul, abstrak, dan kata kunci, dan tahap terakhir adalah tinjauan lengkap artikel. Proses tinjauan dilakukan dengan mengacu pada PRISMA, pedoman pelaporan yang diakui secara internasional (Moher dkk., 2009; Page dkk., 2021). Analisis dilakukan

melalui thematic synthesis dalam tiga tahap Thomas & Harden (2008). Tahap pertama adalah open coding untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan pendukung yang muncul dalam setiap studi. Tahap kedua adalah axial coding untuk mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema ekonomi politik yang lebih luas. Tahap ketiga adalah selective coding untuk mensintesis mekanisme hubungan antar tema dan membangun kerangka konseptual. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu political economy barriers, political economy enablers, dan interaction mechanisms antara keduanya.



Gambar 1. SLR dengan Metode Prisma Sumber Diolah Sendiri Penulis (2025)

PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan ekonomi dan keterbatasannya dalam pengurangan kemiskinan

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi penting, tetapi bukan kondisi yang cukup, untuk menghasilkan pengurangan kemiskinan. Temuan lintas studi memperlihatkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan penurunan kemiskinan bersifat tidak otomatis karena manfaat pertumbuhan tidak selalu terdistribusi secara merata kepada kelompok miskin. Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan hanya seberapa besar pertumbuhan terjadi, melainkan melalui mekanisme apa pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi akses ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam sektor pariwisata, Tobing et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan bergantung pada kekuatan transmisi manfaat ekonomi ke rumah tangga lokal. Temuan ini diperkuat oleh Jeyacheya dan Hampton (2024) yang

menunjukkan bahwa pertumbuhan bahkan dapat bersifat ekstraktif ketika manfaat ekonomi bocor melalui dominasi kepemilikan eksternal, repatriasi keuntungan, dan lemahnya keterkaitan dengan ekonomi lokal. Dalam konfigurasi seperti ini, pertumbuhan tidak hanya gagal menurunkan kemiskinan, tetapi dapat mempertahankan ketimpangan distribusi.

Temuan Budiantoro et al. (2025) semakin memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara mekanisme distribusi sosial justru memiliki pengaruh yang lebih nyata. Pada level rumah tangga, Marwanti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengurangan kerentanan lebih banyak ditopang oleh diversifikasi nafkah dibanding pertumbuhan sektor utama semata. Secara kolektif, temuan-temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan hanya berpotensi menurunkan kemiskinan ketika manfaatnya ditransmisikan melalui struktur ekonomi yang inklusif dan saluran distribusi yang efektif (Tobing et al., 2024; Jeyacheya & Hampton, 2024; Budiantoro et al., 2025).

Keterbatasan pertumbuhan sebagai jalur otomatis pengurangan kemiskinan mengarahkan perhatian pada pertanyaan berikutnya: faktor apa yang menentukan apakah manfaat pertumbuhan dapat ditransmisikan secara efektif kepada kelompok miskin. Literatur menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini terletak pada kapasitas institusi dan tata kelola yang memediasi hubungan tersebut.

2. Institusi dan tata kelola sebagai pendukung dan penghambat penghubung pertumbuhan–kemiskinan

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa institusi dan tata kelola merupakan faktor sentral yang dapat berfungsi sebagai pendukung maupun penghambat dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif ini, pertumbuhan baru berdampak pro-poor ketika dimediasi oleh institusi yang mampu mengarahkan sumber daya, mengimplementasikan kebijakan secara efektif, dan memastikan distribusi manfaat yang inklusif.

Soegijono et al. (2026) menunjukkan bahwa besarnya sumber daya fiskal melalui dana desa tidak otomatis menurunkan kemiskinan tanpa kapasitas pemerintah lokal, validitas targeting, dan koordinasi implementasi yang memadai. Hadi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa dampak belanja pembangunan terhadap kemiskinan sangat bergantung pada prioritas alokasi anggaran, akuntabilitas fiskal, dan perencanaan partisipatif. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat berfungsi sebagai faktor pendukung yang memungkinkan pertumbuhan diterjemahkan menjadi outcome pengurangan kemiskinan.

Sebaliknya, Christy et al. (2025) dan Maolani et al. (2025) menunjukkan bahwa kelemahan desain kelembagaan, fragmentasi regulasi, resistensi politik, dan inefisiensi birokrasi justru menjadi penghambat yang memutus hubungan antara intervensi ekonomi dan penurunan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan desa, Mubarok dan Kurnia (2025) juga memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola lokal menentukan efektivitas penggunaan sumber daya pembangunan. Dengan demikian, literatur menempatkan institusi bukan sekadar konteks implementasi, tetapi sebagai faktor ekonomi politik yang secara aktif dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas hubungan pertumbuhan–kemiskinan (Soegijono et al., 2026; Hadi et al., 2025; Christy et al., 2025).

Namun, kapasitas institusional saja belum cukup menjelaskan mengapa distribusi manfaat pertumbuhan kerap tetap timpang. Bagian selanjutnya akan menunjukkan bahwa persoalan ini juga berkaitan dengan relasi kekuasaan yang menentukan kontrol atas sumber daya dan arah distribusi manfaat pembangunan.

3. Relasi kekuasaan dan kontrol sumber daya dalam distribusi manfaat pertumbuhan

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa distribusi manfaat pertumbuhan pada dasarnya merupakan persoalan relasi kekuasaan. Siapa yang menguasai sumber daya, menentukan aturan distribusi, dan menangkap surplus ekonomi akan sangat menentukan apakah pertumbuhan bersifat inklusif atau justru mereproduksi eksklusif.

Suyatna et al. (2024) menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan lebih mungkin terjadi ketika komunitas lokal memiliki kontrol terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, ketika kontrol atas sumber daya bergeser kepada aktor eksternal atau elite lokal, manfaat pertumbuhan cenderung terkonsentrasi. Kristiansen et al. (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan ketika akses terhadap sumber daya dimediasi oleh struktur sosial yang eksklusif dan dominasi elite.

Dimensi yang lebih eksplisit ditunjukkan oleh Jeyacheya dan Hampton (2024), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan dapat bekerja melalui struktur ekstraktif yang secara sistematis menyalurkan manfaat keluar dari ekonomi lokal. Sementara itu, Mustari et al. (2024) menunjukkan bahwa bahkan dalam mekanisme distribusi sosial, ketimpangan kekuasaan antaraktor dapat menghasilkan bias distribusi. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan sangat ditentukan oleh apakah struktur kekuasaan memungkinkan distribusi manfaat yang inklusif atau justru mendorong konsentrasi manfaat pada kelompok dominan (Suyatna et al., 2024; Kristiansen et al., 2023; Jeyacheya & Hampton, 2024).

Jika relasi kekuasaan dapat menjadi sumber hambatan distribusional, maka literatur juga menunjukkan adanya mekanisme yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang, yaitu redistribusi. Karena itu, pembahasan berikutnya beralih pada bagaimana instrumen redistributif berperan sebagai faktor pendukung dalam memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan.

4. Redistribusi sosial dan fiskal sebagai faktor pendukung pengurangan kemiskinan

Literatur menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjangkau kelompok miskin, mekanisme redistribusi menjadi faktor pendukung yang penting dalam menerjemahkan sumber daya ekonomi menjadi pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif ini, redistribusi berfungsi bukan sekadar sebagai koreksi atas ketimpangan, tetapi sebagai saluran yang menghubungkan manfaat ekonomi dengan kesejahteraan kelompok rentan.

Iskandar et al. (2021) menunjukkan bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, terutama ketika terintegrasi dengan instrumen keuangan sosial yang lebih luas. Temuan ini diperkuat oleh Budiantoro et al. (2025), yang menunjukkan bahwa mekanisme distribusi sosial dapat lebih efektif daripada pertumbuhan agregat dalam menjangkau kelompok

miskin. Pada saat yang sama, Mustari et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas instrumen redistributif bergantung pada kualitas tata kelola distribusinya.

Pada dimensi fiskal, Saptono dan Khozen (2024) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan trust berperan penting dalam menopang fungsi redistributif negara. Sementara itu, Christy et al. (2025) dan Isfianadewi dan El Hasanah (2026) menunjukkan bahwa pembiayaan ultra mikro dan microfinance dapat menjadi faktor pendukung pengurangan kemiskinan ketika didukung desain kelembagaan yang kuat. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa redistribusi sosial dan fiskal merupakan faktor pendukung penting yang memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Iskandar et al., 2021; Budiantoro et al., 2025; Saptono & Khozen, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas redistribusi maupun pertumbuhan tetap tidak seragam di seluruh konteks. Variasi tersebut mendorong perhatian pada karakter kemiskinan itu sendiri, yang dalam literatur dipahami bersifat multidimensional dan turut menentukan keberhasilan maupun keterbatasan dampak pertumbuhan.

5. Kemiskinan multidimensional dan variasi efektivitas pertumbuhan

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sifat kemiskinan yang multidimensional. Karena kemiskinan dibentuk oleh interaksi berbagai deprivasi ekonomi, sosial, spasial, dan kelembagaan, maka dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan menjadi bervariasi antar rumah tangga, wilayah, dan konteks institusional.

Aminah et al. (2025) menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem dipengaruhi oleh kombinasi faktor pekerjaan, tabungan, rasio ketergantungan, akses infrastruktur, dan konektivitas digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro tidak otomatis menurunkan kemiskinan ketika kapabilitas rumah tangga dan lingkungan pendukung tetap lemah. Marwanti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa struktur peluang ekonomi, melalui diversifikasi nafkah, sangat memengaruhi kemampuan rumah tangga memanfaatkan manfaat pertumbuhan.

Pada level struktural, Kristiansen et al. (2023) dan Mubarak dan Kurnia (2025) menunjukkan bahwa pendidikan, layanan dasar, kapasitas lokal, dan kondisi geografis memengaruhi efektivitas pembangunan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa variasi efektivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan bergantung pada apakah pertumbuhan disertai intervensi yang menjawab dimensi-dimensi deprivasi tersebut. Dalam konteks ini, kemiskinan multidimensional bukan sekadar konteks tambahan, tetapi faktor ekonomi politik yang menentukan mengapa pertumbuhan dapat berhasil di satu konteks, tetapi gagal di konteks lain (Aminah et al., 2025; Kristiansen et al., 2023; Marwanti et al., 2024).

Secara keseluruhan, rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dan pendukung ekonomi politik bekerja secara saling terkait, bukan terpisah. Keterbatasan pertumbuhan, kualitas institusi, relasi kekuasaan, mekanisme redistribusi, dan multidimensionalitas kemiskinan bersama-sama membentuk kondisi yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak ditentukan oleh pertumbuhan itu sendiri, tetapi oleh faktor-faktor ekonomi politik yang memediasi distribusi manfaat pertumbuhan. Hambatan utama muncul dari lemahnya tata kelola, institusi eksklusif, distorsi distribusi, dan relasi kekuasaan yang mendorong konsentrasi manfaat. Sebaliknya, kualitas institusi, kapasitas redistribusi, tata kelola akuntabel, dan keterlibatan aktor non-negara berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan.

Kontribusi utama studi ini adalah menunjukkan bahwa faktor ekonomi politik bukan sekadar konteks eksternal, tetapi mekanisme kausal yang menjelaskan berhasil atau gagalnya pertumbuhan diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan. Perspektif ini memperluas literatur dengan menempatkan pertumbuhan, kemiskinan, institusi, dan distribusi kekuasaan dalam satu kerangka analitis yang saling terhubung.

Secara implikatif, strategi pengurangan kemiskinan tidak cukup berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, dan kebijakan redistributif yang mampu mengatasi hambatan struktural distribusi manfaat pembangunan. Namun, literatur masih menyisakan keterbatasan dalam menjelaskan interaksi dinamis antar faktor ekonomi politik lintas konteks. Karena itu, penelitian mendatang perlu memperdalam analisis mengenai kombinasi faktor institusional, distribusional, dan politik yang membentuk variasi efektivitas hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

REFERENSI

- Abeyagoonasekera, A. (2023). Sri Lanka's political-economic crisis; corruption, abuse of power and economic crime. *Journal of Financial Crime*, 30(6), 1432-1443.
- Aminah, S., Mulyadi, M., Saksono, H., Nasution, U. B., Wati, R., Prihadini, D., Djarwadi, D., Nuryana, M., Rahmawati, N. F., & Sumidartiny, A. N. (2025). Uncovering multidimensional determinants of household extreme poverty in Southwest Papua, Indonesia. *Poverty & Public Policy*, 17, e70041. <https://doi.org/10.1002/pop4.70041>
- Agnolin, P., Marseglia, E., & Parolin, Z. (2024). The political economy of poverty and inequality. In *Handbook on the Political Economy of Social Policy* (pp. 129-140). Edward Elgar Publishing.
- Asadullah, M. N., Joseph, J., & Chin, J. (2023). The political economy of poverty reduction in Malaysia. *Progress in Development Studies*, 23(2), 127-151.
- Ayoo, C. (2022). Poverty reduction strategies in developing countries. *Rural development education, sustainability, multifunctionality*, 19, 17-57.
- Budiantoro, R. A., Mustofa, U., Asrori, A., Jayanto, P. Y., Fauzi, A. S., & Runtiningsih, S. (2025). Initiation of social financing for poverty alleviation through cash waqf linked qurban (CWLQ) in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(2), 81-100. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i02.9892>
- Christy, N. N. A., Ika, S., Ardana, I. K., Wibowo, R. A., Anggahegari, P., Nasution, L. Z., Darwin, Suryaneta, Hestina, J., & Elizabeth, R. (2025). Transforming social assistance

- into entrepreneurial empowerment: UMi as a public sector innovation in Indonesia. *Administrative Sciences*, 15(11), 430. <https://doi.org/10.3390/admsci15110430>
- Clift, B. (2021). *Comparative political economy: States, markets and global capitalism*. Bloomsbury Publishing.
- Coccia, M. (2021). How a good governance of institutions can reduce poverty and inequality in society?. In *Legal-economic institutions, entrepreneurship, and management: Perspectives on the dynamics of institutional change from emerging markets* (pp. 65-94). Cham: Springer International Publishing.
- Curtis, B. (2021). State institutions, governance, and poverty. In *Understanding Global Poverty* (pp. 157-182). Routledge.
- Espinosa, V. I., Peña-Ramos, J. A., & Recuero-López, F. (2021). The political economy of rentseeking: Evidence from Spain's support policies for renewable energy. *Energies*, 14(14), 4197.
- Fuseini, M. N., Sulemana, M., Abdulai, I. A., Ibrahim, M. G., & Azure, E. (2022). Role of nongovernmental organizations in poverty reduction in the global South: evidence from world vision Ghana, Kintampo South district. *SN social sciences*, 2(11), 240.
- Hadi, H., Alfitri, A., Nadjib, A., & Adji, A. (2025). Budget allocation model planning for basic infrastructure development to reduce poverty: A case of local government in Palembang City, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.201230>
- Hammond, A., Kleiman, A. J., & Scheffler, G. (2023). The future of anti-poverty legislation. *Geo. LJ*, 112, 349.
- Ipinnaiye, O., & Olaniyan, F. (2023). An exploratory study of local social innovation initiatives for sustainable poverty reduction in Nigeria. *Sustainable Development*, 31(4), 22222239.
- Isfianadewi, D., & El Hasanah, L. L. N. (2026). The role of microfinance in public sector welfare policies: A sustainable finance perspective using Orange Data Mining. *Global Business & Finance Review*, 31(3), 191–204. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2026.31.3.191>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 274–301.
- Jeyacheya, J., & Hampton, M. P. (2024). International tourism in the Global South: Revealing an extractive development process. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Kristiansen, S., Budiman, A., & Pudyatmoko, S. (2023). Ecosystem guardians or threats? Livelihood security and nature conservation in Maluku, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 119–143. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1932744>
- Lee, J. C. G., Prihatiningtias, Y. W., Simon, F., & Lee, S. S. L. (2026). From policy to plate: Optimizing SDG outcomes through school free meals innovation—A case study of Indonesia. *Highlights of Sustainability*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.54175/hsustain5010001>
- Lustig, N. (Ed.). (2023). *Commitment to equity handbook: Estimating the impact of fiscal policy on inequality and poverty*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Malevolti, G. (2023). Why do the poor stay poor? Three essays on asset dynamics and poverty traps.

- Maolani, D. Y., Zulkarnain, F., & Ariesmansyah, A. (2025). Legal framework and governance implications in the state administrative law system: A study of policy innovation in poverty alleviation in developing countries. *Corporate Law & Governance Review*, 7(4), 30–37. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i4p3>
- Marwanti, S., Antriandarti, E., & Khotimah, Y. K. (2024). Determinants of food expenditure and household income in Gunungkidul's karst region. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*. <https://doi.org/10.18280/ijdne.190111>
- Mubarak, F. K., & Kurnia, A. S. (2025). Rural innovations in action: Implementing sustainable development goals at the village level. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(2), 28–49. <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i2.942>
- Mustari, N., Razak, R., Junaedi, J., Fatmawati, F., Hawing, H., & Baharuddin, T. (2024). Multipartner governance and the urgency of poverty alleviation policy: Zakat fundraising management. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2361529. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2361529>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *BMJ* (Online), 339 (7716), 332–336. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 12041224.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pouw, N., & Bender, K. (2022). The poverty reduction effect of social protection: the pros and cons of a multidisciplinary approach. *The European Journal of Development Research*, 34(5), 2204-2223.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2024). Enhancing taxpayer compliance through fiscal transparency, participation and accountability: Insights from key figures of Islamic boarding schools in Depok City. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(2), 20–44. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i2.533>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soegijono, S. P., Ratumuruna, S., Paulus, N., & Lameky, V. Y. (2025). Modeling for rural poverty reduction by utilizing village funds in Maluku Province of Indonesia. *Multidisciplinary Science Journal*, 8, e2026046. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2026046>
- Stockhammer, E., & Kohler, K. (2023). Learning from distant cousins? Post-Keynesian economics, comparative political economy, and the growth models approach. In *Varieties of Capitalism* (pp. 56-75). Edward Elgar Publishing.
- Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). How community-based tourism improves community welfare? A practical case study of 'governing the

- commons' in rural Nglanggeran, Indonesia. *The International Journal of Community and Social Development*, 6(1), 77–96. <https://doi.org/10.1177/25166026241228717>
- Szanyi, M. (2022). The emergence of patronage and changing forms of rent seeking in East Central Europe. *Post-communist economies*, 34(1), 122-141.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.
- Tobing, M., Afifuddin, S., Ginting, R., & Sari, R. L. (2024). Evaluating community welfare effects of the tourism development on Geopark Caldera Toba. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1667–1678. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3630>